

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 44 TAHUN 2012 SERI C.6

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk meningkatkan tertib administrasi di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu dibuat petunjuk pelaksanaan peraturan dimaksud guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

13. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2, Seri C1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Kepala adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
7. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai Pemegang Kas Daerah.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, dan perubahan status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau beserta orang lain dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
18. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain yang menjadi tempat tinggal beberapa orang bersama-sama.
19. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
25. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
26. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
27. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

28. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
29. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terhutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (4) Penyetoran retribusi KTP dan KK dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya selama 2 x 24 jam.

- (5) Jangka waktu penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi kecamatan yang berjarak lebih dari 20 Km dari Ibukota Kabupaten.
- (6) Jangka waktu penyeteroran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi waktu selama 6 (enam) hari kerja sejak retribusi diterima.
- (7) Setiap akhir bulan Tim Teknis Kependudukan membuat rekapitulasi setoran dari tiap kecamatan.

BAB III **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur dengan cara menghitung jumlah dan jenis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV **GOLONGAN RETRIBUSI PRINSIP DAN SASARAN** **PENETAPAN TARIF**

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Bagian Pertama

Struktur

Pasal 6

Struktur dan besaran tarif retribusi penggantian biaya cetak pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan berdasarkan jenis yang terdiri atas:

- a. Pendaftaran Penduduk:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI dan orang asing;
 2. Kartu Keluarga (KK) untuk WNI dan orang asing;
 3. Surat Keterangan Pindah Datang untuk WNI dan orang asing;
 4. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk orang asing;
 5. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI dan orang asing;
 6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI dan orang asing;
 7. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).
- b. Pencatatan Sipil:
 1. kutipan akta kematian untuk WNI dan orang asing;
 2. kutipan akta perkawinan didalam dan luar kantor untuk WNI dan orang asing;
 3. kutipan akta perceraian untuk WNI dan orang asing;

4. kutipan akta pengesahan dan pengakuan anak untuk WNI dan orang asing; dan
5. kutipan kedua karena rusak/hilang untuk WNI dan orang asing :
 - 1) kutipan akta kematian;
 - 2) kutipan akta perkawinan;
 - 3) kutipan akta perceraian; dan
 - 4) kutipan akta pengesahan dan pengakuan anak.
6. Kutipan ketiga dan seterusnya karena rusak/hilang untuk WNI dan orang asing :
 - 1) kutipan akta kematian;
 - 2) kutipan akta perkawinan;
 - 3) ketipan akta perceraian; dan
 - 4) kutipan akta pengesahan dan pengakuan anak.
7. Surat Keterangan
 - 1) Pembatalan Akta Perkawinan
 - 2) Pembatalan Akta Perceraian

Bagian Kedua
Perhitungan Retribusi
Pasal 7

- (1) Penetapan retribusi telah memperhitungkan biaya-biaya:
 - a. pemeliharaan sistem dan sarana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pemeliharaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. penerbitan dokumen surat-surat keterangan kependudukan dan akta-akta catatan sipil;
 - d. penatausahaan;
 - e. pengawasan, pembinaan, sosialisasi dan pengendalian.
- (2) Retribusi ditetapkan secara nominal untuk setiap obyek pelayanan.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Retribusi
Pasal 8

NO	JENIS PELAYANAN
A	PENDAFTARAN PENDUDUK : <ol style="list-style-type: none"> 1 Kartu Tanda Penduduk 2 Kartu Keluarga 3 Surat Keterangan Pindah Datang 4 Surat Keterangan Tempat Tinggal 5 Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 6 Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 7 Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS)
B	PENCATATAN SIPIL : <ol style="list-style-type: none"> 1 Kutipan Akta Kematian 2 Kutipan Akta Perkawinan <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan di dalam kantor b. pencatatan di luar kantor 3 Kutipan Akta Perceraian 4 Kutipan Akta Pengakuan Anak

5	Kutipan Kedua karena rusak/hilang : a. Kutipan Akta Kematian b. Kutipan Akta Perkawinan c. Kutipan Akta Perceraian d. Kutipan Akta Pengakuan Anak
6	Kutipan Ketiga dan seterusnya karena hilang/rusak : a. Kutipan Akta Kematian b. Kutipan Akta Perkawinan c. Kutipan Akta Perceraian d. Kutipan Akta Pengakuan Anak
7	Surat Keterangan a. Pembatalan Perkawinan b. Pembatalan Perceraian

BAB VI
RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Penggunaan semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 digunakan untuk :
 - a. Pembayaran insentif 5% (lima perseratus);
 - b. Operasional Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 95% (Sembilan puluh lima perseratus).
- (2) Rincian penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Rincian penggunaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan besar masing-masing komponen yang dikelompokkan sebagai berikut :
 1. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Operasional kegiatan pencatatan sipil 95% (sembilan puluh lima perseratus).
 2. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
 - Pembinaan manajemen 5% (limaperseratus) Meliputi: Pembinaan, pengembangan dan pengawasan, kegiatan perencanaan, pengorganisasian. yang bertujuan untuk peningkatan kinerja.
 - Penyediaan Blanko & Bahan Habis Pakai serta penunjang operasional lainnya 85% (Delapan puluh lima perseratus) Meliputi : cetak blanko, alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya,
 - Peningkatan kualitas 5% (lima perseratus) Meliputi : pemeliharaan komputer, database dan jaringan, serta biaya lembur.

BAB VII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Cirebon, tetapi memiliki Objek Retribusi di wilayah Kabupaten Cirebon.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir

- pendaftaran dan pendataan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirimkan atau disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
 - (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VIII **TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI** Pasal 11

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX **TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN** Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penyelenggaraan di tempat pelayanan.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau kelompok yang memperoleh jasa pelayanan pemberian KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembayaran retribusi harus dilakukan dengan uang tunai sekaligus lunas.
- (6) Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X **KETENTUAN LAIN** Pasal 12

Biaya yang digunakan dalam kegiatan ini baik pengadaan blanko serta biaya operasional penerbitan KTP, KK, Akta-akta Catatan Sipil dan dokumen kependudukan lainnya dibebankan pada APBD dalam tahun berjalan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 5 Nopember 2012

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 6 Nopember 2012

2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 44 SERI C.6

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 5 Nopember 2012

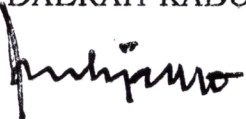
BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 6 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 44 SERI c.6